



JURNAL LEDALERO

ISSN 1412-5420

WACANA IMAN DAN KEBUDAYAAN
Discourse on Faith and Culture

Vol. 12 No. 2 Desember 2013

TERAKREDITASI SK DIRJEN DIKTI KEMENDIKNAS RI NO. 66b/DIKTI/ KEP/2011

NEGARA DAN AGAMA

LIBERALISME VERSUS PERFEKSIONISME?

Otto Gusti

AGAMA DAN POLITIK DALAM ISLAM

Matias Daven

NEGARA DAN GEREJA

Norbert Jegalus

JATI DIRI: YANG NASIONALIS DAN YANG RELIGIUS

Bernard Hayong

DEI VERBUM: "ALKITAB BUKU TERBUKA"

Simeon Bera Muda

DIALOG: TRIBUTE PAUS EMERITUS BENEDIKTUS XVI

Markus Solo

PENCARIAN KESAKSIAN KRISTEN YANG RELEVAN DI ASIA

Ebenhaizer I. Nuban Timo

ARISTOTLE AND THOMAS AQUINAS

Frans Ceunfin

Keadilan Sosial dalam Tantangan Ekonomi Pasar

Andre Ata Ujan

GLOBALISASI EKONOMI, BUDAYA KAPITALIS DAN DEMOKRASI

Mikhael Dua



STFK LEDALERO

JURNAL LEDALERO
WACANA IMAN DAN KEBUDAYAAN
Discourse on Faith and Culture

Terbit dua kali setahun: Januari-Juni / Juli-Desember.
Berisi tulisan ilmiah tentang teologi, filsafat, ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan.

Penanggung Jawab

Bernard Raho (Ketua STFK Ledalero)

Ketua Penyunting

John M. Prior

Wakil Ketua Penyunting

Philipus Tule

Penyunting Ahli

Georg Kirchberger

Otto Gusti Madung

Philip Ola Daeng

Robert Mirsel

Frans Ceunfin

Bernard S. Hayong

Richard Muga

Penyunting Pelaksana

John M. Prior

Otto Gusti Madung

Bernard S. Hayong

Resensi Buku

Otto Gusti Madung

Alamat Redaksi

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

Maumere 86152 – Flores – NTT

Telp. 082145883380, Fax : 0382/21892

Email: jurnalledalero@yahoo.com

Harga per tahun Rp. 50.000 (di luar ongkos kirim)

Pembayaran berlangganan dapat dilakukan melalui:

Bank BRI Unit Nita, Maumere No. Rek. 4694-01-000018-50-3

a/n. STFK Ledalero

Percetakan

Moya Zam-Zam Printika, Yogyakarta

DAFTAR ISI

EDITORIAL: AGAMA DAN NEGARA.....	167
LIBERALISME VERSUS PERFEKSIONISME? SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT POLITIK TENTANG RELASI ANTARA AGAMA DAN NEGARA	
Otto Gusti Madung.....	173
AGAMA DAN POLITIK – HUBUNGAN YANG AMBIVALEN DIALOG VERSUS “BENTURAN PERADABAN”?	
Mathias Daven	191
HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN GEREJA: IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	
Norbertus Jegalus.....	221
JATI DIRI: YANG NASIONALIS DAN YANG RELIGIUS DALAM BINGKAI KEWARGANEGARAAN 235	
Bernard Hayong.....	235
<i>DEI VERBUM</i> “ALKITAB BUKU YANG TERBUKA”	
Simeon Bera Muda	
John Mansford Prior.....	249
DIALOG: <i>TRIBUTE</i> UNTUK PAUS EM. BENEDIKTUS XVI	
Markus Solo Kewuta	271
PENCARIAN KESAKSIAN KRISTEN YANG RELEVAN DI ASIA	
Ebenhaizer I. Nuban Timo.....	289
ARISTOTLE AND THOMAS AQUINAS: TWO ACCOUNTS OF THE VIRTUES	
Fransiskus Ceunfin	311
KEADILAN SOSIAL DALAM TANTANGAN EKONOMI PASAR	
Andre Ata Ujan.....	333
GLOBALISASI EKONOMI, BUDAYA KAPITALIS DAN DEMOKRASI	
Mikhael Dua.....	355

PADA MASA ITU.....	373
RESENSI BUKU.....	391
INDEKS.....	399
PARA PENULIS.....	405

EDITORIAL: Agama dan Negara

Konsili Vatikan II telah menghembuskan beberapa perubahan radikal dalam kehidupan menggereja. Pergeseran paradigmatis tersebut sekurang-kurangnya mencakupi empat aspek penting. *Pertama*, perubahan relasi dengan agama-agama (*Nostra aetate*: khususnya Islam). *Kedua*, perubahan makna misi (*Ad gentes*: berpusat pada kerajaan Allah, gereja untuk misi bukan misi untuk gereja; *Gaudium et spes*: JPIC). *Ketiga*, Gereja partisipatif (*Lumen gentium*: Sinode, Konferensi Waligereja, Dewan Pastoral tingkat Keuskupan, dan Paroki; badan-badan “non-kanonika” seperti Komunitas Basis Gerejani dan Gerakan Eklesial Baru). *Kecempat*, kedaulatan suara hati (*Dignitatis humanae*: termasuk relasi dng negara/ dunia sekular / budaya - *Gaudium et spes*)

Jurnal Ledalero edisi sebelumnya telah berbicara tentang Konsili Vatikan II secara umum. Edisi *Jurnal Ledalero* kali ini kembali hadir ke hadapan pembaca dengan mengusung tema seputar salah satu aspek penting yang dilahirkan oleh Konsili Yohanes XXIII itu, yakni relasi antara agama dan negara. Tema ini berkaitan erat dengan dua dokumen penting Konsili yakni *Nostra aetate* dan *Dignitatis humanae*. Membaca kembali kedua dokumen ini dalam kaca mata konteks sosio-politis Indonesia tentu sangat penting. Pluralitas kehidupan beragama merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan agama ini menuntut satu kesanggupan untuk membangun dialog demi terwujudnya kerukunan hidup bersama.

Gereja pasca Vatikan II sadar bahwa kasih dan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan amatlah besar dan melampaui kemampuan manusia dan agama-agama. Rahmat Tuhan mahabesar itu tak dapat dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Karena itu segala bentuk eksklusivisme agama dan intoleransi bertentangan dengan doktrin resmi Gereja Katolik.

Pesan-pesan kebebasan beragama Konsili Vatikan II ini membutuhkan konteks sosio-politik agar roh kebebasan tersebut dapat bersemi. Indonesia cukup lama dikenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai dan harmoni serta menghargai kebebasan beragama. Namun akhir-akhir ini pelbagai bentuk intoleransi dan kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan bersama. Kekerasan tersebut bukan

saja terjadi dalam relasi antarumat beragama, namun sering mendapat legitimasi dari negara lewat produk undang-undang yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. UU Perkawinan, SKB Ahmadiyah, Rancangan Undang-Undang Kerukunan Beragama dan pelbagai perda syariat atau injil di daerah-daerah merupakan contoh kebijakan diskriminatif yang diproduksi oleh negara. Negara bukan saja gagal menjalankan kewajiban etisnya yakni melindungi hak-hak asasi warganya termasuk hak kebebasan untuk berkeyakinan, melainkan juga secara sistematis menciptakan regulasi-regulasi yang membonsai kebebasan asasi warga tersebut.

Dominasi mayoritas atas minoritas adalah fenomena umum di Indonesia. Relasi timpang ini tidak hanya dijumpai di kalangan Islam. Di daerah-daerah di mana Gereja Katolik tampil sebagai mayoritas, aroma intoleransi juga dapat diendus dengan sangat gampang. Di Maumere misalnya gereja minoritas seperti GBI Rock hingga kini kesulitan mendapat pengakuan dari negara untuk mendirikan rumah ibadah yang layak. Alasannya, gereja-gereja tersebut dipandang mengganggu stabilitas kelompok mayoritas. Rupanya intoleransi merupakan patologi sosial yang melekat dalam diri setiap kelompok mayoritas.

Dalam relasi mayoritas minoritas label “ajaran sesat” juga nyaring terdengar. Pandangan atau tafsiran ajaran yang melenceng dari *mainstream* begitu gampang dinilai sesat atau bahkan jahat. Kerap kali penilaian “sesat” tersebut tidak cuma berhenti sampai pada tataran ideologis, melainkan berubah menjadi aksi-aksi kekerasan atau pemusnahan kelompok-kelompok lain hanya karena keberlainannya. Dalam kondisi seperti ini negara sering tidak hadir atau jika hadir, ia justru memperkokoh rezim kebenaran teologis yang ikut memberi label ajaran sesat.

Bagaimanakah seharusnya negara menyikapi ajaran-ajaran yang dianggap “sesat” ini? Prinsipnya, karena Indonesia bukan negara agama, maka kesesatan teologis bukan urusan negara. Kewajiban negara ialah menjamin dan melindungi kebebasan beragama warganya seperti diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 18: “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama.” Kebebasan beragama juga dijamin dalam konstitusi kita sebagai hak konstitusional warga negara. Maka, SKB dua Menteri No. 9/ 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat sesungguhnya membatasi kebebasan beragama dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia serta konstitusi NKRI.

Sikap negara terhadap fenomena “ajaran sesat” menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikut: Mengapa negara ada dan di mana saja

batas-batas kewenangan negara? Bagaimanakah relasi antara negara dan moralitas privat, politik dan agama harus dirumuskan? Artikel-artikel dalam edisi *Jurnal Ledalero* kali ini coba membedah persoalan-persoalan ini dan memberikan solusi agar Indonesia tetap menjadi rumah bersama yang damai, adil dan setara bagi semua.

Otto Gusti Madung dalam tulisannya memperkenalkan dua model legitimasi keberadaan negara yakni liberalisme dan perfeksionisme. Menurut liberalisme basis legitimasi keberadaan negara ialah jaminan atas kebebasan individual. Perfeksionisme meletakkan dasar legitimasi keberadaan negara pada pencapaian sebuah keadaan sempurna yang diinginkan. Perfeksionisme menawarkan solusi terhadap patologi liberalisme yang cenderung memprivatisasi konsep hidup baik. Dalam perfeksionisme tematisasi konsep hidup baik seperti ideologi dan agama harus mendapat tempat di ruang publik. Di Indonesia peran ini dijalankan oleh Pancasila. Pancasila menghendaki agar nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi moralitas publik.

Di tengah masyarakat modern yang plural agama-agama berjuang untuk memberi warna etis bagi ruang publik. Hal ini ditunjukkan oleh **Matias Daven** dalam tulisannya tentang agama dan politik. Dalam sebuah masyarakat monokultural peran publik agama tidak sulit dipraktikkan. Persoalan menjadi rumit dalam sebuah masyarakat multikultural. Di sini fundamentalisme dan primordialisme dapat mengancam kehidupan bersama. Untuk mengatasi bahaya ini, Daven menganjurkan agar relasi antara agama dan politik harus dibangun atas analisis yang kokoh tentang hubungan antara agama dan kebudayaan. Di satu sisi agama berperan sebagai kritik atas kebudayaan. Namun di sisi lain dimensi sakral absolutistis agama dapat memutlakkan aspek-aspek yang sesungguhnya relatif seperti politik. Untuk itu agama harus ditafsir kembali agar memancarkan wajah kemanusiaan.

Secara lebih spesifik lagi **Norbert Jegalus** merumuskan hubungan antara agama dan politik dari sudut pandang Gereja. Ulasannya berpijak pada ucapan Yesus sendiri dalam Mt 22:21 yang berbunyi: *"Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah."* Ungkapan Yesus ini menjadi awal dari konsep modern pemisahan antara agama dan negara. Ini juga menjadi awasan terhadap bahaya absolutisasi atau pengalihan politik yang dapat menindas manusia. Kekuasaan Allah yang terwujud dalam nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, penghormatan terhadap pribadi manusia dan perhatian terhadap lingkungan memberikan batasan terhadap praktik kuasa politik. Jegalus juga memberikan pendasaran teologis mengapa seorang beriman Katolik harus terlibat dalam politik.

Di samping itu juga dijelaskan bahwa agama-agama sebagai warisan kerohanian masyarakat dan arena itu termasuk dalam wawasan kesejahteraan umum harus mendapat perlindungan dari negara.

Ketegangan relasi antara agama dan negara tidak hanya bergerak pada ranah sosial, namun merasuk hingga ke jantung jati diri seorang manusia. **Bernard Hayong** dalam tulisannya menggambarkan ketegangan dalam diri seorang manusia yang memiliki identitas sebagai warga negara dan insan religius. Seorang warga negara Indonesia misalnya memiliki identitas diri yang religius sekaligus nasionalis. Dalam sebuah masyarakat plural seperti Indonesia Hayong menuntut adanya sebuah proses transformasi kreatif agar identitas religius ketika memasuki ranah publik dapat diungkapkan dalam bahasa-bahasa rasional dan nonsektarian.

Jika keempat artikel di atas berbicara tentang relasi antara agama dan negara, artikel-artikel berikut ini tidak berkaitan langsung dengan tema utama ini. **Simeon Bera Muda** dan **John Mansford Prior** membahas salah satu dokumen penting Konsili Vatikan II yakni Konstitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi. Dokumen ini memperluas wawasan pemahaman tentang wahyu sebagai pernyataan diri Allah kepada seluruh alam ciptaan dengan tujuan persekutuan cinta dengan Allah dalam Kristus. Wahyu-diri Allah Tritunggal dalam Kristus ini mengundang umat manusia untuk masuk ke dalam dialog kasih, dan menanggapinya dalam iman yang membuahkan tekat dan komitmen pribadi. Panggilan manusia selaku murid Kristus adalah untuk mengikuti Yesus, kini dan di sini. Artinya, setiap pengikut Kristus mesti bergumul dengan Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan belajar membaca Injil pada masa kini dan dalam tempat ini pula. Dengan demikian pemahaman Kitab Suci tidak bersifat harafiah-fundamentalistik. Sebuah cara menghayati religiositas yang memancarkan wajah kemanusiaan dan kompatibel dengan tuntutan masyarakat multikultural.

Untuk membangun tatanan sosial yang damai dan bebas kekerasan di tengah masyarakat multikultural, dialog adalah sebuah keniscayaan. Dengan dialog kita mengedepankan senjata bahasa dan bukannya bahasa senjata dalam menyelesaikan pelbagai persoalan. Hal ini ditekankan oleh **Markus Solo** dalam tulisannya berjudul "Dialog: Tribute untuk Paus Em. Benediktus XVI". Semangat dialog ini diteruskan oleh **Ebenheizer Nuban Timo** dalam artikelnya berjudul "Pencarian Kesaksian Kristen yang Relevan di Asia". Bertolak dari pandangan teologis Kosuke Koyama, Nuban Timo menekankan pentingnya dialog antara kekristenan dengan nilai-nilai budaya Asia. Asia dikenal sebagai

benua tempat lahirnya agama-agama besar yang hidup berdampingan satu sama lain. Pluralitas ini di satu sisi adalah kekayaan, namun dapat menjadi ancaman bagi kehidupan bersama jika tidak dikelola dengan baik. Dengan menggunakan kaca mata teologis Kosuke Koyama, Nuban Timo memberikan panduan bagaimana Kekristenan harus tampil di tengah realitas pluralitas agama dan budaya di Asia.

Setiap masyarakat plural seperti Asia dan usaha-usaha dialog antara agama membutuhkan basis etis bersama. Dialog tak mungkin berjalan jika setiap budaya atau agama hanya menekankan keunikan masing-masing. Refleksi filosofis membantu kita untuk menemukan nilai-nilai bersama tersebut. Dalam tradisi filsafat Barat dikenal dua macam etika yakni etika deontologis atau kewajiban dan etika teleologis atau keutamaan. Dalam artikelnya **Frans Ceunfin** memperkenalkan etika keutamaan Aristoteles dan Thomas Aquinas.

Di samping bahaya agama yang cenderung mendikte kebijakan-kebijakan negara seperti tampak dalam pelbagai peraturan bernuansa agama di Indonesia, peran negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat dapat saja terdistorsi oleh sistem ekonomi pasar bebas tanpa kendali. Bahaya ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Partai-partai politik tidak mengaspirasikan kehendak rakyat, tapi memperjuangkan kepentingan imperium bisnis yang mendanai partai-partai politik. Fenomena kartel politik ini tengah mengendalikan politik bangsa Indonesia pasca reformasi. Persoalan-persoalan seputar relasi antara ekonomi pasar bebas dan negara coba dibedah oleh **Andre Ata Ujan** dalam tulisannya berjudul *Keadilan Sosial dalam Tantangan Ekonomi Pasar*. Persoalan yang hampir sama diulas lebih lanjut oleh **Mikhael Dua** dalam tulisan berjudul *Globalisasi Ekonomi, Budaya Kapitalis, dan Demokrasi*. Globalisasi ekonomi memiliki karakter monarki, dalam arti mengandalkan seorang raja sebagai sumber keputusan, acuan kegiatan dan inspirasi kehidupan. Dan raja itu adalah kapital. Untuk keluar dari kemelut ini, dengan berguru pada Ansperger, Mikhael Dua mengusulkan agar kapitalisme sendiri mengubah dirinya dari dalam, terutama dengan mengembangkan metode diskusi interaktif 'pemecahan masalah'. Dengan metode ini diharapkan masyarakat mengambil inisiatif untuk menyuarakan ketidakpuasannya secara efektif, mengutarakan kepentingan-kepentingannya sendiri secara sadar berdasarkan aspirasi-aspirasi bersama yang didukung oleh analisis dan diagnosis para kritikus sosia.

Di tengah krisis multidimensional yang tengah medera bangsa Indonesia, **Paul Budi Kleden** dalam rubrik "Pada Masa itu..." menurunkan tulisan tentang Jan Raats, seorang imam SVD yang

memperjuangkan Indonesia Federal. Tulisan ini memberikan solusi bagi bangsa Indonesia ketika terjadi tarik ulur antara ideologi “NKRI harga mati” dan gerakan memisahkan diri dari NKRI.

Edisi *Jurnal Ledalero* ini akan hadir ke hadapan publik pembaca pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014. Pada tahun 2014 rakyat Indonesia akan menjalankan tugas politik penting yakni memilih pemimpin nasional dan para wakilnya di parlemen. Di tengah prahara politik kebangsaan yang ditandai patologi privatisasi ruang publik oleh agama, dinasti politik dan politik kartel, artikel-artikel *Jurnal Ledalero* coba meneteskan embun-embun yang mungkin dapat memberi kepuasan akan dahaga mencari kebenaran dalam berdemokrasi dan berbangsa. Selamat membaca.

Otto Gusti Madung

PENCARIAN KESAKSIAN KRISTEN YANG RELEVAN DI ASIA (Kosuke Koyama: Injil Menurut Pandangan Asia)

Ebenhaizer I. Nuban Timo

Abstract

To live as church in Asia is very demanding. Asia is known as the continent that gave birth to world religions whose followers in Asia live close to one another as neighbours. Each religion has a certain knowledge about the spiritual richness of her neighbours. Buddhists, for example, know that Christians are requested by the Lord to live a life of self-sacrifice. Christians are called by their master (Jesus) not to go forward fighting on behalf of the cross but to bear their cross on behalf of Jesus, not displaying a self-glorified life but practising self-denial. How is this command to be fulfilled in Asia by the Christian Church? This essay discusses the perspective of one of Asia's most prominent theologians, Kosuke Koyama.

Kata-kata Kunci: Teologi Asia, Tafsiran Dunia Ketiga, Kristologi Asia, Dialog antar Iman dan Agama-agama Asia.

Pendahuluan

Asia adalah bunda yang dari rahimnya lahir semua agama berkitab suci di dunia.¹ Agama Kristen termasuk agama yang lahir dari rahim bunda Asia. Segera setelah dilahirkan agama Kristen dijadikan anak angkat dari bunda Eropa. Ia dibawa pergi meninggalkan Asia berabad-abad lamanya. Selama berabad-abad dibesarkan dalam rumah bunda angkat, kekristenan kehilangan suasana ke-Asia-annya. Ia menjadi sangat kebarat-baratan.

Memasuki abad ke-17 dan 18 agama Kristen menemukan jalan untuk kembali ke Asia, ke rumah bunda yang mengandung dan melahirkannya.

¹ Aloysius Pieris, "Menuju Teologi Pembebasan Asia: Beberapa Pedoman Religo-Kultural," dalam: Douglas J. Elwood. *Teologi Kristen Asia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992, hlm.262.